

Analisis Pemahaman Pajak Penghasilan Dan Sanksi Pajak Pada Wajib Pajak Pribadi Karyawan PT. Bina Artha Ventura

Muhammad Risyaf¹, Arif Rakhman²

¹Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Terbuka, mhdriyaf1995@gmail.com

²Tutor Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Terbuka, arman1210@yahoo.co.id

²Dosen Program Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Singaperbangsa Karawang, arif.rakhman@fe.unsika.ac.id

ABSTRACT

General society adds to the state depository through charges which are utilized to fund state consumption and in view of enforceable regulations. Charges are paid without getting equal administrations that can be demonstrated straightforwardly (counter execution). This exploration means to dissect the comprehension of pay endlessly charge sanctions on individual citizens of PT representatives. Bina Arta Ventura. This exploration is quantitative examination, and the information source got is essential information. The example for this examination was 50 workers at PT. Bina Adventure. Information examination utilizes numerous direct relapse investigation. The consequences of the exploration show that in a halfway test, understanding personal duty affects individual citizens at PT. Bina Arta Ventura, charge sanctions influence individual citizens. In view of a concurrent trial of understanding pay endlessly charge endorses, the impact on worker individual citizens. With a coefficient of assurance (R square) of 0.771, and that implies that concurrent comprehension of pay endlessly charge approvals can make sense of 77.1% of individual citizens at PT. Bina Arta Ventura and the rest are affected by different factors outside the examination.

Keywords: *Income Tax, Sanctions, Employees*

ARTICLE INFO:

Keywords:

*Akuntansi, Akuntansi
Keuangan, Pajak, Akuntansi
Sektor Publik*

PENDAHULUAN

Kemajuan pada dasarnya adalah pemulihan yang konsisten untuk mencapai kondisi yang dipandang lebih baik. Perbaikan dilakukan melalui serangkaian usaha yang hanya diakui dengan bantuan keuangan yang besar. Sumber daya tersebut diperoleh melalui berbagai sumber, khususnya otoritas publik dan bidang rahasia, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dan salah

satunya berasal dari permintaan uang. Tugas penilaian sangat penting bagi negara. Pendapatan retribusi masuk ke dalam tabungan negara dan digunakan untuk pengembangan masyarakat antara lain untuk hal-hal seperti transportasi umum, sekolah, kesejahteraan, anuitas, dan kepentingan daerah (Amalia, 2018).

Menurut Mahardika (2019)., pengeluaran dapat diartikan sebagai cadangan yang diperoleh dari perseorangan untuk perseorangan. Retribusi merupakan komitmen wajib bagi penduduk yang terutang oleh orang atau benda yang bersifat memaksa menurut peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercantum dalam peraturan nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas peraturan nomor 6 tahun 1983 tentang peraturan umum dan tata cara pemungutan pajak, tanpa memperoleh imbalan segera dan dipergunakan untuk keperluan negara demi kesejahteraan individu yang terbaik.

Direktorat Jenderal Tugas Pelayanan Keuangan (Kemenkeu) mencatat pengakuan terungkapnya Formulir Pemerintahan Tahunan (SPT) Tahun 2020 (Pajak, 2020). Memperluas Jumlah Penduduk (WP) yang Andal. Jumlah Surat Peringatan Pribadi (SPT) Tahunan yang diterima pada tahun 2020 sebanyak 14,76 juta. Jumlah ini meningkat dari 73% pada tahun sebelumnya, yang mewakili 78% dari total responden yang diharapkan menyampaikan SPT. Namun tingkat kestabilan WP (Warga) belum mencapai target 80% (Jayani, 2021).

Dalam masyarakat, setiap orang mempunyai hak dan tanggung jawab dalam kehidupan. Jalannya hubungan yang proporsional antara manusia dan masyarakat sangatlah penting. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mempunyai komitmen dan kewajiban terhadap masyarakat dan masyarakat mempunyai komitmen dan kewajiban terhadap masyarakat. Selain itu, terdapat hubungan proporsional antar negara yang memberikan jenis bantuan kepada penduduknya sebagai penduduk yang memenuhi komitmennya terhadap negara. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya argumentasi yang dapat merugikan pihak-pihak yang hanya mementingkan haknya saja (Segara, 2021).

Retribusi adalah komitmen yang harus dibuat oleh masyarakat kepada otoritas publik sesuai dengan peraturan dan pedoman material yang dibatasi tanpa mendapatkan keuntungan langsung dalam struktur apa pun dan aset yang dikumpulkan digunakan untuk mendukung pembelanjaan terbuka (Segara, 2021). Penataan pondasi jalan, dukungan pendidikan, administrasi kesejahteraan, keamanan dan administrasi publik lainnya merupakan sebagian dari manfaat pendapatan bea. Dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas pemilihan bea di Indonesia, berbagai jenis penilaian dikenakan pada penduduk, termasuk biaya pribadi, biaya lokal, biaya tambahan harga, biaya penjualan produk mewah, biaya pengalihan, biaya promosi, biaya hadiah, dll. Kedua biaya tersebut diawasi oleh pemerintah pusat dan administrasi negara bagian provinsi. Hal ini dilakukan melalui ekstensifikasi, penguatan dan peningkatan kerangka organisasi pengeluaran.

Pengeluaran tahunan mulai dari warisan terpadu, gaji orang, unsur usaha dan organisasi super kuat yang menghasilkan uang di wilayah Indonesia bergantung pada tugas pribadi. Salah satunya adalah Penilaian Tahunan Pasal 21, yaitu pemungutan gaji mulai dari kompensasi, honorarium, tunjangan dan angsuran lain-lain sehubungan dengan pekerjaan, administrasi atau kegiatan yang dilakukan oleh setiap warga negara dalam negara, termasuk pekerja terampil dan pekerja mandiri (Mahdi dan Ardianti, 2017).

Pengeluaran pribadi yang sering dikenakan pada pengurus organisasi adalah Bea Tahunan Pasal 21 (PPh 21). Bea Pribadi Pasal 21 (PPh 21) adalah pengeluaran paksa pada Subyek Penilaian atas uang yang diperoleh atau diperoleh dalam suatu tahun anggaran. Wajib Pajak adalah orang yang membayar pajak dan mendapat bayaran. Pengeluaran Tahunan Pasal 21 (Pph 21) dikenakan kepada Warga Negara yang mempunyai Gaji Tersedia (PKP). Selain itu, warga juga harus memiliki kartu Nomor Bukti Pembeda Warga Negara (NPWP). Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berfungsi sebagai identitas pribadi untuk keperluan perpajakan. Menurut Mahardika (2019), NPWP juga digunakan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT) setiap tahunnya (Pajak, 2020).

Organisasi diberi wewenang untuk menahan pengeluaran tahunan dari perwakilannya, karena situasi mereka sebagai manajer pekerja. Kedudukan organisasi sebagai pihak yang melakukan pemotongan biaya harus ditopang oleh pemahaman mendasar mengenai gagasan dan pengaturan yang berkaitan dengan tugas pribadi, termasuk tarif dinamis yang berlaku pada perkiraan biaya tahunan Pasal 21. Selain itu, organisasi juga diharapkan mengetahui konsep PTKP (Tidak Tersedia Gaji) terkini, yang mempengaruhi tunjangan penilaian pribadi yang nyata. Selain organisasi, para wakil rakyat juga harus mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai keistimewaan dan kewajiban belanja negara sehingga bisa menambah pendapatan negara, yang juga akan dinikmati oleh daerah setempat (Segara, 2021).

Eksplorasi masa lalu yang meneliti subjek serupa, khususnya berbicara tentang pemahaman tentang upah tanpa henti membebaskan sanksi terhadap eksekusi warga negara individu untuk pekerja, menunjukkan bahwa tidak adanya informasi tentang pengeluaran pribadi disebabkan oleh kurangnya pemahaman dari dunia usaha dan tidak adanya informasi mengenai pengeluaran pribadi. sosialisasi dari Direktorat Jenderal Tugas Daerah Medan (Falhan, 2022).

Untuk situasi ini pencipta berpusat pada komitmen penilaian individu. Yang dimaksud dengan perorangan dalam hal ini adalah pegawai PT. Bina Arta Venturadi Kawasan Percut Sei Tuan. Penelitian ini tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pemahaman Pajak Penghasilan Dan Sanksi Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan PT, Bina Arta Ventura,” dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai kewajiban pajak orang pribadi khususnya bagi pegawai tidak tetap.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Akuntansi Pajak

Pembukuan dicirikan sebagai cara paling umum untuk membedakan, memperkirakan, dan menyampaikan data moneter kepada kliennya dalam memikirkan berbagai pilihan lain yang ada dan memenuhi kebutuhan. Pembukuan biaya menentukan berapa banyak hutang yang harus dibayar berdasarkan laporan moneter yang disiapkan oleh organisasi. Suatu komponen akuntansi yang dikenal dengan akuntansi perpajakan merupakan hasil suatu komponen spesialisasi berdasarkan keahlian pada bidang tertentu. Pembukuan retribusi dilakukan karena adanya standar-standar penting yang tertuang dalam peraturan bea masuk dan penataannya dipengaruhi oleh kemampuan pemungutan pajak dalam melaksanakannya sebagai strategi pemerintah (Siamena, 2017).

Perpajakan

Pajak adalah untuk meningkatkan gaji suatu negara, membiayai landasan, dan mengucurkan APBN. Tujuan pajak sangatlah penting karena pendapatan negara digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan negara dengan berbagai cara. Persyaratan ini berkisar dari konsumsi tenaga kerja hingga pendanaan berbagai kegiatan pembangunan kantor publik, misalnya jalan, jembatan, sekolah, klinik darurat, dan dukungan kerangka kerja. Keunggulan biaya adalah tol dijadikan alasan para ahli yang terbuka dalam menentukan kebijakan moneter APBN. Spesialis publik dapat mengoordinasikan perbaikan moneter melalui prosedur biaya. Dengan adanya tugas, para pejabat publik mempunyai sumber daya untuk melakukan pedoman terkait dengan kestabilan biaya sehingga pembangunan dapat dikendalikan sehingga seluruh masyarakat mendapat manfaat yang setara dengan hampir tidak ada ketidakseimbangan yang bersahabat (Mardiasmo, 2018).

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran dapat diartikan sebagai keadaan mengetahui, memahami, dan siap memenuhi kewajiban seseorang, seperti kesediaan menyumbangkan harta untuk pengembangan kemampuan pemerintahan dengan membayar kewajiban tugas seseorang (Tulenan, 2017). Alasan adanya kesadaran biaya adalah untuk mengetahui adanya peraturan dan pengaturan penilaian, mengetahui kemampuan biaya untuk menunjang negara dan memahami bahwa komitmen biaya harus diselesaikan sesuai pedoman yang relevan (Mahdi dan Ardianti, 2017).

Wajib Pajak Orang Pribadi

Warga berinteraksi untuk belajar tentang pemungutan pajak dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk memangkas biaya dengan memahami pedoman tugas. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008, orang pribadi atau kelompok yang telah mematuhi peraturan tertentu disebut sebagai Wajib Pajak orang pribadi. Setiap warga negara hanya diharapkan untuk membayar biaya yang terutang berdasarkan gaji yang mereka terima. Setiap warga negara mempunyai komitmen untuk melaporkan gaji, sumber daya, dan kewajibannya setahun sekali dalam struktur SPT Tahunan kepada KPP (Ashari, 2022).

Pemahaman Pajak Penghasilan

Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima selama suatu tahun pajak disebut pajak penghasilan orang pribadi atau badan (pajak PPh). Gaji yang dipertanyakan tersebut bisa saja berasal dari keuntungan usaha, tunjangan karyawan, honorarium, hadiah, atau sumber lainnya. Peraturan Nomor 7 Tahun 1983 tentang Penilaian Tahunan yang pada umumnya direvisi dengan Peraturan Nomor 10 Tahun 1994 merupakan peraturan tentang penerbitan dan pedoman pelaksanaan Penugasan Pribadi yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1984. Penerima pembayaran Tugas Pribadi Pasal 21 adalah wakil; penerima manfaat pesangon, anuitas atau tunjangan, THT, JHT, termasuk penerima manfaat utamanya; bukan pekerja; individu dari kelompok hakim/manajer terkemuka yang tidak bertindak sebagai wakil; mantan pekerja; selanjutnya, anggota dalam latihan seperti kontes, pertemuan dan pertemuan (Siamena, 2017).

Sanksi Pajak

Sanksi retribusi merupakan jaminan bahwa pengaturan peraturan bea (standar retribusi) akan dipatuhi, ditaati tanpa henti. Atau sebaliknya, sanksi retribusi menjadi alat penghambat agar warga tidak mengabaikan standar retribusi. Sanksi retribusi merupakan jaminan bahwa pengaturan peraturan dan pedoman tugas (standar retribusi) akan dipatuhi, dipatuhi, disetujui atau seluruhnya, sanksi retribusi merupakan upaya preventif agar masyarakat tidak mengabaikan standar retribusi. Bentuk sanksi penilaiannya meliputi persetujuan otoritatif dan sanksi pidana (Falhan, 2022).

Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh 21 atau Pengeluaran Pribadi 21 merupakan kewajiban yang dipaksakan atas gaji yang diterima oleh perorangan warga negara. PPh 21 dikenakan pada berbagai jenis pembayaran, misalnya gaji pekerja, gaji usaha, gaji bunga toko, dan lain-lain. PPh 21 juga diberlakukan terhadap upah yang diperoleh dari luar negeri, sepanjang upah tersebut dapat diatur sebagai upah yang dapat dibebani di Indonesia. Lalu, faktor apa saja khususnya 1 yang mempengaruhi penghitungan PPh 21

1. Gaji Tidak Tersedia (PTKP)

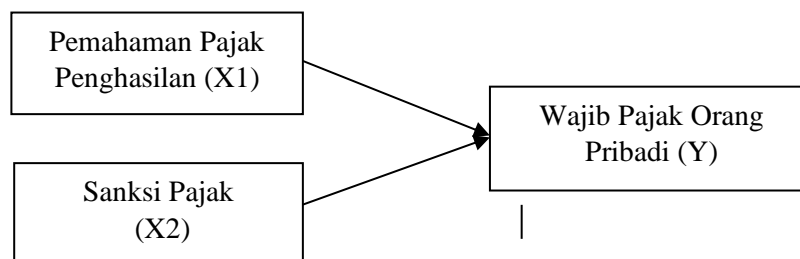
PTKP adalah kependekan dari *Non-Available Pay*. PTKP merupakan batas gaji pokok yang tidak bergantung pada bea masuk tahunan bagi penduduk Indonesia. Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 digunakan untuk menghitung PTKP ini. Dalam hal gaji orang perseorangan melebihi PTKP, maka gaji itu tergantung pada tugas pribadinya. Namun jika gaji seseorang tidak melebihi PTKP, maka gaji tersebut tidak bergantung pada pengeluaran pribadi (Wahyoni, 2021).

2. Tarif PPh 21

Tarif pengeluaran pribadi 21 bergantung pada tarif moderat dimana tarif mengikuti besarnya gaji. Tarif bea tahunan tahun 2022 mengikuti tarif Peraturan Harmonisasi Pengeluaran. Sebelumnya, hingga tahun 2021, berlaku tarif 5% untuk pembayaran terjauh hingga Rp 50.000.000. Batasannya saat ini dinaikkan menjadi Rp 60.000.000 (Wahyoni, 2021).

3. Nomor Bukti Pengenal Warga Negara (NPWP)

NPWP sangat berdampak pada penghitungan PPh 21. Pekerja yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif biaya sebesar 120% dari tarif yang bersangkutan, artinya mereka membayar 20% lebih tinggi dibandingkan pekerja yang memiliki NPWP (Wahyoni, 2021).



Gambar 1. Kerangka Berfikir

Hipotesis

1. H1: Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan pegawai PT Arta Bina Ventura terkena dampak signifikan dari pemahaman pajak penghasilan.
2. H2: Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan pegawai PT Arta Bina Ventura terkena dampak signifikan dari sanksi perpajakan.
3. H3: Wajib pajak orang pribadi PT Arta Bina Ventura mendapatkan manfaat yang signifikan dengan adanya pemahaman mengenai pajak penghasilan dan sanksi perpajakan.

METODE PENELITIAN

Strategi pemeriksaan yang digunakan adalah kuantitatif subjektif. Sugiyono mengartikan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka, yaitu data yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner atau wawancara yang diisi oleh responden. Informasi Subjektif adalah informasi yang diperoleh melalui suatu siklus yang melibatkan metode pemeriksaan sebagai kalimat, bukan dalam kerangka berpikir berupa gambar angka (Sugiyono, 2019). Dimana pemeriksaan ini dilakukan di PT. Gedung Bina Arta Ventura di Jl. Perintis, 35 Dusun XII, Kota Melati Bandar Khalipah, Percut Sei Tuan, Toko Serdang, Sumatera Utara. Kelompok ini termasuk pegawai yang terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi di PT. Bina Arta Ventura. Populasi sampel penelitian adalah 50 karyawan PT. Bina Arta Ventura. Sumber informasi dalam penelusuran ini diperoleh secara langsung dari individu warga yang terdaftar sebagai perwakilan di PT. Bina Arta Ventura. Metode penelitian informasi yang digunakan adalah dengan menggunakan survei atau jajak pendapat, khususnya strategi pengumpulan informasi yang dilakukan dengan memberikan kepada responden sekumpulan pertanyaan tertulis untuk ditanggapi dan kemudian menangani informasi tersebut dengan menggunakan SPSS varian 26. Faktor bebas dalam penelitian ini adalah Pemahaman Pribadi Penilaian Kewajiban (X1) dan Kewenangan (X2) serta variabel dependennya, yaitu Perorangan Warga Negara (Y). Uji eksplorasi informasi yang digunakan adalah uji dugaan teladan, uji relaps ganda, dan uji spekulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

**Tabel 1. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.36845022
Most Extreme Differences	Absolute	.133
	Positive	.133
	Negative	-.120

Test Statistic	.133
Asymp. Sig. (2-tailed)	.228 ^c

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data diolah SPSS 26, 2023

Mengingat efek samping pengujian pada kewajaran yang dilakukan pada faktor bebas dan bawahan, diperoleh hasil, misalnya plot, figur Kolimogorov-Smirnov, dan histogram. Mengingat bahwa faktor-faktor dalam penelitian ini biasanya tersebar, maka dapat diasumsikan bahwa tingkat kritis sisa lebih besar dari 0,05.

Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

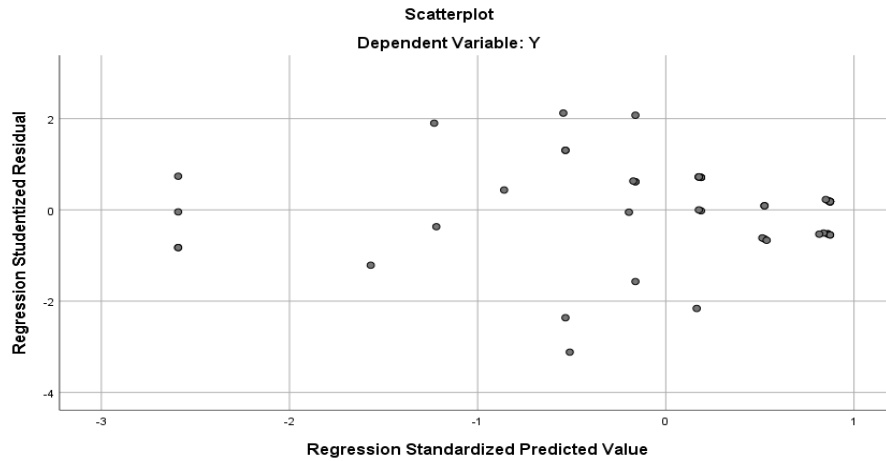
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	2.871	1.772		1.620	.112		
Pemahaman Pajak Penghasilan (X1)	.029	.175	.026	2.165	.000	.202	4.956
Sanksi Pajak (X2)	.846	.154	.855	5.499	.000	.202	4.956

a. Dependent Variable: Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Sumber: Data diolah SPSS 26, 2023

Hasil Uji Multikolinearitas pada tabel diatas menunjukkan bahwa VIF insentif Persetujuan Penilaian (X2) dan Pemahaman Tugas Pribadi (X1) sebesar 4,956. Multikolinearitas sering diasumsikan mempunyai efek samping pada model relaps karena faktor independen mempunyai nilai VIF lebih besar dari 10 dan nilai ketahanan dibawah 0,10.

Uji Heterokedastisitas



Sumber: Data diolah SPSS 26, 2023
Gambar 2. Hasil Uji Heterokedastisitas

Gambar di atas menunjukkan bahwa titik-titik tersebut tersebar di mana-mana, dan tidak terakumulasi begitu saja pada suatu titik tertentu. Penyebaran fokus informasi ini juga tidak memberikan contoh yang spesifik. Sehingga cenderung beralasan bahwa model relaps pada pemeriksaan ini tidak menemui permasalahan heteroskedastisitas.

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 3. Hasil Perhitungan Regresi Linear Variabel Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	2.871	1.772		1.620	.112		
Pemahaman Pajak Penghasilan (X1)	.029	.175	.026	2.165	.000	.202	4.956
Sanksi Pajak (X2)	.846	.154	.855	5.499	.000	.202	4.956

a. Dependent Variable: Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Sumber: Data diolah SPSS 26, 2023

Berikut ini diketahui estimasi parameter model persamaan regresi, seperti terlihat pada tabel di atas:

$$\text{Wajib Pajak Orang Pribadi} = 2.871 + 0,029 + 0,846 + e$$

Berikut penjelasan persamaan regresi linier berganda yang telah disampaikan sebelumnya:

1. Konstanta pada persamaan sebelumnya sebesar 2,871 menunjukkan bahwa nilai Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) akan sebesar 2,871 apabila terdapat pengaruh dari Sanksi Pajak (X2) dan Pemahaman Pajak Penghasilan (X1).
2. Variabel Pemahaman Pajak Penghasilan (X1) mempunyai nilai sebesar 0,029 yang menunjukkan koefisien regresi positif. Dengan asumsi variabel independen lainnya tetap, hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi akan mengalami kenaikan sebesar 0,029 setiap kenaikan Pemahaman Pajak Penghasilan sebesar 1%.
3. Dengan nilai sebesar 0,846 maka variabel Sanksi Pajak (X2) mempunyai koefisien regresi positif. Dengan asumsi seluruh variabel independen lainnya tetap, hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi akan mengalami peningkatan sebesar 0,846 untuk setiap kenaikan sanksi pajak sebesar satu persen.

Uji Parsial (Uji T)

**Tabel 4. Uji t (Uji Parsial)
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	2.871	1.772		1.620	.112		
Pemahaman Pajak Penghasilan (X1)	.029	.175	.026	2.165	.000	.202	4.956
Sanksi Pajak (X2)	.846	.154	.855	5.499	.000	.202	4.956

a. Dependent Variable: Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Sumber: Data diolah SPSS 26, 2023

Konsekuensi dari uji pecahan (uji-t) dianalisis berdasarkan tabel di atas untuk mengetahui apakah setiap variabel otonom yang digunakan dalam pengujian ini mempengaruhi warga negara

yang berbeda. Nilai t tabel diperoleh dengan $k = 3$, $n = 50$ dan $df = n - k$ ($50 - 3$) sehingga t tabel = 2,011. Secara umum akan ditutup untuk setiap variabel sebagai berikut:

a. Dampak Pemahaman Personal Assessment pada Individu Warga Negara di PT. Bina Arta Ventura

Belum sepenuhnya ditetapkan pada variabel Pemahaman Usaha Individu adalah 2,165 dengan tingkat Sig. 0,000, dengan nilai thitung ($2,165$) > ttabel ($2,011$) dan dengan tingkat Sig. ($0,000$) < $0,05$, maka dapat dibayangkan bahwa variabel Evaluasi Persepsi Individu berdampak pada Individu Penduduk. Jadi penyelidikan ini menguatkan hipotesis (H1 diterima).

b. Dampak Persetujuan Biaya Terhadap Perorangan Warga Negara di PT. Bina Arta Ventura

Variabel Persetujuan Pengeluaran mempunyai nilai Sig sebesar 5,499 sebagai nilai yang ditentukan. $0,000$, dengan nilai Sig dan nilai thitung ($5,499$) lebih besar dibandingkan ttabel ($2,011$). $0,000$ < $0,05$, maka dapat diterima bahwa variabel Dukungan Penggunaan berdampak pada Penduduk Perorangan. Oleh karena itu, penemuan penelitian ini mendukung spekulasi tersebut (H2 diterima).

Uji Simultan (Uji F)

**Tabel 5. Uji F (Uji Simultan)
ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	308.560	2	154.280	79.023	.000 ^b
	Residual	91.760	47	1.952		
	Total	400.320	49			

a. Dependent Variable: Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak (X2), Pemahaman Pajak Penghasilan (X1)

Sumber: Data diolah SPSS 26, 2023

Terlihat pada tabel di atas nilai kritisnya adalah $0,000 = 0,05$. Dengan $df(n1) = 3$, $df(n2) = 47$, dan tingkat signifikansi $0,05$, diperoleh nilai F tabel sebesar $3,20$, sehingga memperkuat temuan analisis. Nilai Sig dan nilai Ftabel keduanya lebih besar dari nilai Fhitung ($79,023 > 3,20$). $0,000 < \alpha = 0,05$. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa (H3) diterima. Maka wajar saja jika hasil pemeriksaan ini menunjukkan bahwa (Ha3) diterima. Sehingga cenderung diasumsikan bahwa akibat dari eksplorasi ini menunjukkan bahwa faktor bebas *Understanding Pay Endless Charge Endorses* sekaligus secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen Individu Warga Negara pada PT. Bina Arta Ventura.

Uji Koefisien Determinasi**Tabel 6. Uji Koefisien Determinasi (R^2)**

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.878 ^a	.771	.761	1.397

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak (X2), Pemahaman Pajak Penghasilan (X1)

b. Dependent Variable: Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Sumber: Data diolah SPSS 26, 2023

Terlihat pada tabel di atas nilai kritisnya adalah $0,000 = 0,05$. Dengan $df(n1) = 3$, $df(n2) = 47$, dan tingkat signifikansi $0,05$, diperoleh nilai F tabel sebesar $3,20$, sehingga memperkuat temuan analisis. Nilai Sig dan nilai Ftabel keduanya lebih besar dari nilai Fhitung ($79,023 > 3,20$). $0,000 < \alpha = 0,05$. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa (H_3) diterima. Maka wajar saja jika hasil pemeriksaan ini menunjukkan bahwa (Ha_3) diterima. Sehingga cenderung diasumsikan bahwa akibat dari eksplorasi ini menunjukkan bahwa faktor bebas Understanding Pay Endless Charge Endorses sekaligus secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen Individu Warga Negara pada PT. Bina Arta Ventura.

Pembahasan

Pembicaraan dalam eksplorasi ini direncanakan untuk menyadarkan hasil pemeriksaan dengan sasaran penelitian. Konsekuensi dari diskusi tambahan akan dijelaskan dalam fokus berikut:

1. Pengaruh Pemahaman Pajak Penghasilan Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di PT. Bina Arta Ventura

Konsekuensi dari pengujian menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Pengeluaran Pribadi Bagi Warga Negara Perorangan. Nilai t hitung insentif variabel Personal Task Understanding sebesar $2,165$ dengan tingkat Sig menunjukkan hal tersebut. $0,000$, dengan tingkat Sig dan nilai thitung ($2,165$) lebih besar dari ttabel ($2,011$). Jika ($0,000$) $0,05$ menunjukkan bahwa variabel Penilaian Pribadi Pemahaman mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Individu Warga Negara, maka sangat mungkin terjadi. Hasilnya, penyelidikan ini memperkuat hipotesis bahwa H_1 diterima. Hal ini benar-benar berarti bahwa untuk setiap kenaikan 1% dalam Pemahaman Penilaian Tahunan, hal ini akan meningkatkan Warga Perorangan sebesar $0,029$ dengan harapan faktor gratis lainnya tetap stabil.

2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di PT. Bina Arta Ventura

Nilai Sig hitung pada variabel Sanksi Pajak sebesar $5,499$. $0,000$, dengan tingkat Sig dan nilai thitung sebesar $5,499$ lebih tinggi dari nilai ttabel sebesar $2,011$ Karena variabel Persetujuan Kewajiban berpengaruh terhadap Individu Warga Negara ($0,000$) $> 0,05$. Jadi pemeriksaan ini menguatkan dugaan H_2 diterima. Hal ini berarti bahwa untuk setiap kenaikan 1% pada Persetujuan

Penilaian, hal ini akan meningkatkan Warga Perorangan sebesar 0,846 dengan harapan faktor otonom lainnya tetap stabil.

3. Pengaruh Pemahaman Pajak Penghasilan dan Sanksi Pajak Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di PT. Bina Arta Ventura

Konsekuensi dari eksplorasi tersebut menunjukkan adanya kesamaan dalam Pemahaman Membayar Tanpa Henti Memungut Assent bagi Warga Negara Perorangan. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji sinkron atau F-Test yang menunjukkan bahwa besarnya manfaat Pemahaman Bayar Tanpa Batas Biaya Persetujuan Bagi Warga Perorangan adalah 0, nilai kritis $0,000 > 0,05$ dan nilai Fhitung $79,023 > 3,20$, menjadi spesifik $79,023 > 3,20$. Sehingga cenderung diasumsikan H_0 diakui dan H_03 diberhentikan, hal itu berarti terdapat pengaruh Pemahaman Tugas Pribadi (X1) dan Persetujuan Pengeluaran (X2), terhadap Perorangan Warga Negara (Y) di PT. Bina Arta Ventura.

KESIMPULAN DAN SARAN

Mengingat konsekuensi eksplorasi dan perbincangan yang telah dilakukan dalam pemeriksaan ini untuk menentukan dampak pemahaman tugas pribadi dan wawasan kerja pada individu warga negara, maka PT. Bina Arta Ventura, para analis membuat beberapa penentuan dan gagasan sebagai berikut:

1. Wajib pajak orang pribadi di PT sebagian dipengaruhi oleh pemahamannya terhadap pajak penghasilan. Ventura Adalah Bina Arta. Hal ini menunjukkan bahwa temuan uji hipotesis dapat diterima kebenarannya.
2. Di PT, wajib pajak orang pribadi sebagian terkena dampak sanksi perpajakan. Ventura Adalah Bina Arta. Hal ini menunjukkan bahwa temuan uji hipotesis dapat diterima kebenarannya.
3. Wajib pajak orang pribadi di PT akan mendapatkan manfaat dari uji pemahaman pajak penghasilan dan sanksi perpajakan secara simultan. Ventura Adalah Bina Arta. Hal ini menunjukkan bahwa temuan uji hipotesis dapat diterima kebenarannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, AR (2018). Dampak Penyelenggaraan E-Recording, Informasi Penilaian, dan Kewenangan Tugas terhadap Konsistensi Perorangan Warga Negara dalam Merinci Formulir Pemerintahan (Analisis Kontekstual pada Dinas Diklat Rezim Tegal). *E-Prosedur Dewan*, 59(2), 5164-5165. <https://doi.org/10.13541/j.cnki.chinade.2012.10.004>.
- Ashari, MH (2022). Memperluas Konsistensi Perorangan Warga Negara (Perwakilan) Melalui Persiapan Penyelesaian Formulir Pemerintahan Tahunan Swasta Tahunan. *Buku Harian Personalia Keuangan UNRAM*, Vol 2, No 2.
- Siamena, Elfin HS (2017). Dampak Persetujuan Pengeluaran dan Perhatian Warga Terhadap Konsistensi Individu Warga Negara di Manado. *Buku Harian Eksplorasi Pembukuan Going Concern*, Vol 12 (2), 917-927.

- Jayani, DH (2021). Proporsi Konsistensi Warga PPh Tahun 2020 Meleset dari Target. P. Katadata.Co.Id.
- Mahardika, SA (2019). Dampak Gaji Lokal dan Dukungan Penunjukan Umum terhadap Penggunaan Modal dengan Pembangunan Keuangan sebagai Variabel Pengarah. Buku Harian Ilmu Pembukuan dan Eksplorasi, Vol 8 No 11.
- Mahdi dan Ardianti, W. (2017). Dampak Kewaspadaan Warga Negara dan Otorisasi Penilaian terhadap Konsistensi Individu Warga Negara di Kantor Administrasi Pengeluaran Esensial. 3(1) 22-31.
- Mardiasmo. (2018). Pengumpulan pajak. Jogjakarta: CV. Andi Mengimbangi.
- Falhan, Muhammad H.d. (2022). Investigasi Pemahaman Bayar Tanpa Henti Membebaskan Persetujuan Eksekusi Perwakilan Warga Negara Perorangan (WP Over Powered). Pemilik: Eksplorasi dan Buku Harian Pembukuan, Vol 7, No 1 <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1266>.
- Charge, K.K. (2020, 7 Juli). Pengaturan Tugas Tahunan Corporate Citizen "Pelayanan Uang Direktorat Jenderal Pengkajian. . www.pajak.go.id .
- Segara, WM (2021). Investigasi Dampak Perhatian dan Pemahaman Pedoman Penilaian terhadap Konsistensi Pengungkapan PPH Bagi Warga Perusahaan di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati. JIMA: Buku Harian Logis Pembukuan, Vol 1, No 2.
- Sugiyono. (2019). Teknik Eksplorasi Kuantitatif, Subyektif dan Penelitian dan Pengembangan. Bandung : Urutan huruf.
- Tulenan, RA (2017). Pengaruh Citizen Mindfulness, Mutu Administrasi Tugas dan Persetujuan Penilaian Terhadap Konsistensi Individu Warga Negara di KPP Prata Blitung. Kelangsungan Hidup: Buku Harian Eksplorasi Pembukuan, 12(2) 296-303.
- Wahyoni, GS (2021). Beban Penilaian Pribadi di Indonesia (Pasal 21 Peraturan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Tugas Tahunan). Buku Harian Locus Delicti, Vol 2, No.1 <https://doi.org/10.23887/jld.v2i1.456>.